



BOJONEGORO
produktif



Pinarak
ojonegoro

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RANKIR PERUBAHAN RENJA PD) Tahun 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOJONEGORO



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akurasiabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOJONEGORO
Jl. Patimura 26 A Bojonegoro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 telah dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

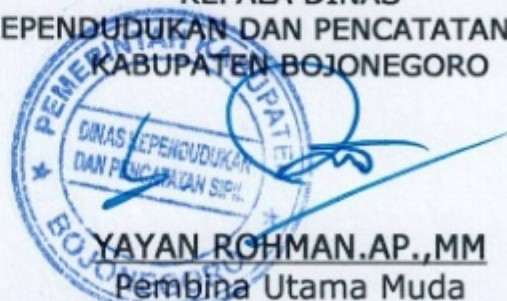
Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomer 78 tahun 2021 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro salah satu isinya menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai perwujudan dari tanggung jawab pelaksanaan tugas yang melekat, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, adapun data yang disajikan selain berupa table juga terdapat uraian yang bersumber pada Musrembang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 ini kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Penetapan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Bojonegoro, 06 Agustus 2024

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN.AP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Sistematika Penulisan.....	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	
3.3. Program dan Kegiatan.....	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	
BAB V PENUTUP.....	
LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pattimura Nomor 26 A Telp. 0353-881256

BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 470/59 /412.210/2024

TENTANG

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah disyahrkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- b. Bahwa dengan telah disyahrkannya Peraturan Mendagri No. 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kota dilingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan peraturan Mendagri nomor 21 tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional? Kepala BAPPENAS dan MENTERI DALAM NEGERI Nomor : **0008/M.PPN/01/2007 050/264.A/SJ** Tanggal 12 Januari 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOJONEGORO
- Pertama : Penetapan Perangkat daerah (Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD) Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Bojonegoro
Pada tanggal: 06 Agustus 2024

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN.AP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 470/59 / 412.210/2024
Tanggal : 06 Agustus 2024

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024–2026. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bojonegoro.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan di dalam Dokumen Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja meliputi : pembentukan Tim penyusunan Rencana Kerja PD, orientasi mengenai Rencana Kerja, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan konformasi.

b. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung untuk pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1. Tahapan penyusunan Rencana Kerja PD

- Pengolahan data dan informasi
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu
- Analisis gambaran pelayanan PD
- Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD
- Perumusan kegiatan prioritas
- Penyajian awal dokumen Rancangan Renja PD
- Penyempurnaan Penetapan PD
- Pembahasan forum perangkat daerah
- Penyesuaian dokumen Rencana Kerja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arus dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri berkaitan dengan SPM.

2. Tahap penyajian Penetapan PD

c. Pelaksanaan forum perangkat Daerah

Forum perangkat daerah merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat dan era dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk menyempurnakan rancangan kebijakan penyusunan Penetapan PD. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom up planning)

berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi dalam proses penyusunan Rencana Kerja PD pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara Kabupaten/Kota dengan propinsi.

d. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja Perangkat daerah untuk menjadikan pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen - dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Keterkaitan tersebut program kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Hal ini bertujuan mengetahui antara dokumen - dokumen perencanaan yang dilakukan perangkat daerah yang meliputi Renstra, Renja, RKA dan dokumen manajemen berbasis kinerja

Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya.



Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 13 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2021 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas pokok:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro didukung oleh sumber daya, sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan baik ASN maupun Non ASN Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Desember 2022 ada 106 orang yang terdiri dari ASN kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebanyak 32 orang, ASN yang merupakan Operator Kecamatan sebanyak 27 orang, Non ASN Kantor Dispendukcapil

sebanyak 8 orang, Non ASN di Kecamatan sebanyak 39 orang
 Dengan rincian sebagaimana table berikut:

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat					
2	SMA Sederajat	31	4	22	2	59
3	D2			2		2
4	D3	2	2			4
5	S1	4	9	13	8	34
6	S2	6	1			7
7	S3					
J U M L A H		43	16	37	10	106

Berdasarkan table diatas dapat melihat kondisi pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan tingkat Pendidikan baik ASN maupun Non ASN, termasuk kategori mempunyai kapasitas sumberdaya yang memadai dalam mengelola dan melaksanakan tugas dan fungsinya, karena sebanyak 106 pegawai yang bertempat Kantor Dispenduk capil maupun di Kecamatan berpendidikan tinggi: S-1 dan S-2.

Demikian pula bila dilihat dari komposisi aparatur bahwa sekolah terendah pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah D2 baik yang bertempat di Kecamatan. Bagi pegawai yang berpendidikan SLTA yang lebih lima tahun memasuki pensiun dianjurkan melanjutkan kuliah, agar meningkat kompetensi managerial maupun sosial serta melakukan penyesuaian dengan mengikuti diklat teknis dan non teknis, pelatihan lainnya untuk mengasah skill serta kecakapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Desember 2023 ada 59 orang, dengan rincian sebagaimana table berikut:

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	32	5	37
2	Golongan III	6	10	16
3	Golongan IV	5	1	6
JUMLAH		43	16	59

1.2 Landasan Hukum

Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 2 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 23 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro

17. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro No 52 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

1.3 Maksud dan Tujuan

Penetapan Perangkat Daerah tahun 2024 disusun dengan maksud untuk :

- a. Pedoman resmi dalam menyusun program dan kegiatan prioritas perangkat daerah pada tahun anggaran 2024;
- b. Langkah pencapaian perencanaan program kegiatan 5 tahun dalam renstra PD;
- c. Penetapan PD merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Penetapan dan Anggaran (RKA) tahun 2024;
- d. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kerja tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah pada tahun 2024.

Tujuan :

Agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan aturan kerja yang akan melakukan aktivitas/kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, sehingga terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN,

1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian singkat tentang Renja PD proses penyusunan Penetapan Perangkat Daerah, keterkaitan antara Penetapan Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra PD serta tindaklanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan hukum

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Penetapan Perangkat Daerah

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Penetapan PD serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PENETAPAN PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Penetapan PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Penetapan PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Penetapan PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Penetapan PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD,

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SARARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Penetapan Perangkat Daerah,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal PD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Rencana Kerja Indikator Kinerja

Rencana Kerja indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Rencana Kerja indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

C. LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 seluruhnya disetujui untuk masuk RKA (Rencana Kerja Anggaran), adapun program kegiatan yang diusulkan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Usulan Rancangan Akhir Perubahan Renja (Rp)	Disetujui (Rp)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.200.306.473	Rp. 13.200.306.473
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 257.720.300	Rp. 257.720.300
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.044.387.779	Rp. 9.044.387.779
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 389.434.000	Rp. 389.434.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.116.773.062	Rp. 2.116.773.062
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 562.394.200	Rp. 562.394.200
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 331.133.632	Rp. 331.133.632
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 498.463.500	Rp. 498.463.500
II.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 845.745.890	Rp. 845.745.890
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 103.413.900	Rp. 103.413.900
2.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp. 640.179.300	Rp. 640.179.300
3.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp. 102.152.690	Rp. 102.152.690
III.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 354.796.000	Rp. 354.796.000
1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 117.140.700	Rp. 117.140.700

2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 210.349.400	Rp. 210.349.400
3.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 27.305.900	Rp. 27.305.900
IV.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 3.632.914.390	Rp. 3.632.914.390
1.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp. 60.907.400	Rp. 60.907.400
2.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 369.690.500	Rp. 369.690.500
3.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 3.302.316.490	Rp. 3.302.316.490
JUMLAH		Rp. 18.033.762.753	Rp. 18.033.762.753

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD), maka sebagai instansi teknis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok dan fungsi , yakni :

Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris mempunyai Tugas pokok:

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan dan penyajian administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
5. Pengelolaan urusan rumah tangga;
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan produk hukum daerah
7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
8. Pengelolaan kearsipan dinas;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dinas terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Analis Kebijakan Ahli Muda

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan pengelolaan dan rumah tangga;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir, dan pensiun pegawai;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan

pegawai;

- e. Melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- g. Melaksanakan pengelolaan data; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberi oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk Menyusun anggaran;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;
- c. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD;
- d. Melaksanakan penghitungan anggaran dan verifikasi;
- e. Menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- f. Mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor serta makanan dan minuman;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk :

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
6. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- a. Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda;

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil antara lain :

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
2. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
6. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda;

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Fungsi

1. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
4. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
5. Pelaksanaan kerjasama Administrasi Kependudukan.
6. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :

- a. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi-inovasi dibidang kependudukan dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan kabupaten Bojonegoro dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kependudukan dan sosialisasi Peraturan Daerah
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan Kabupaten Bojonegoro secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk mengikatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntunan tugas.
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dengan Rancangan Awal RKPD, tidak melakukan penambahan usulan dan kegiatan. Secara rinci dijabarkan sebagaimana tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD, dalam hal ini belum ada usulan dari pihak manapun.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2019 – 2025 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024, maka arah kebijakan pembangunan bidang kependudukan difokuskan pada penataan administrasi kependudukan dengan meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan melaksanakan sosialisasi adminduk.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Tujuan dan sasaran Renja 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tertuang dalam RENSTRA 2024 – 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuannya

- Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bojonegoro

Sasarannya

Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Penyusunan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Akhir PD adalah merupakan perencanaan tahunan yang harus dicapai dan merupakan tahap pencapaian perencanaan 5 Tahun yang tertuang dalam RENSTRA PD. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RENSTRA Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro adalah:

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 9. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 11. Pelayanan Pencatatan Sipil
 12. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 13. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 14. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data base Kependudukan
 15. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 16. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- b. Perumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja PD yang menguraikan program dan kegiatan tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tentunya melalui tahapan – tahapan yang telah diatur dalam ketentuan. Perumusan program dan kegiatan, disesuaikan dengan plafon anggaran yang telah digariskan oleh tim anggaran. Adapun kegiatan yang akan dilakukan memprioritaskan hasil Musrenbang dengan mempertimbangkan dengan plafon anggaran yang ada. Tahun 2024 pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebesar Rp. 18,033.762.753 (Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)

Berdasarkan hasil akhir Musrenbang, usulan rumusan perencanaan program kegiatan tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro adalah terdiri dari 4 Program dan 16 Kegiatan dengan anggaran 18,033.762.753 (Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)

Rumusan program dan kegiatan beserta pagu anggaran inilah yang masuk dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

- c. Tabel rencana program dan kegiatan (Tabel 3.1)

BAB IV PENUTUP

Demikian rangkaian uraian mengenai penjelasan Rancangan Akhir Perubahan APBD Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023 dibuat sebagai pedoman implementasi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tahun 2024

Ada kalanya terdapat perubahan anggaran dan terdapat revisi peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan tambahan dalam Rencana Kerja PD tahun 2024

Untuk itu diharapkan agar dinamika tersebut dapat diantisipasi dengan baik dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang berpedoman pada prinsip prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik (Goodgovermence)

Bojonegoro, 06 Agustus 2024

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOJONEGORO**



YAYAN ROHMAN.AP.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

Tabel 2.1 Sebelum Revisi

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2023
Kabupaten Bojonegoro

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Terget Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase layanan yang dilaksanakan	9,141,837,466	7,371,534,728	9,786,144,103	9,415,706,749	96.21	100%	6,021,044,148	65.86
2 12 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunya layanan dan anggaran evaluasi perangkat daerah	97,028,600	180,845,225	84,753,600	78,664,700	92.82	100%	39,583,385	40.80
2 12 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,671,393,582	5,765,362,961	6,969,153,054	6,750,167,656	96.86	100%	5,170,216,229	67.40
2 12 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase tersusunya administrasi kepegawaian perangkat daerah	232,800,000	102,141,200	407,497,900	365,099,670	89.60	100%	2,950,000	1.27
2 12 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum perangkat daerah	596,760,220	859,550,500	1,910,973,380	1,851,217,478	96.87	100%	458,940,128	76.91
2 12 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	42,918,650	73,705,500	-	-	-	100%	27,000,000	-
2 12 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	329,596,414	225,253,692	299,197,319	259,661,245	86.79	100%	174,043,906	52.81
2 12 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	171,340,000	164,675,650	114,568,850	110,896,000.00	96.79	45 unit	148,310,500	86.56
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase pelayanan kependudukan	614,914,900	923,032,393	374,364,700	355,486,193	94.96	100%	434,007,800	70.58

2	12	02	2	01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan	67,062,400	875,633,663	10,600,000	10,600,000	100.00	100%	37,510,600	55.93
2	12	02	2	03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Prosentase pencetakan dokumen kependudukan	493,046,800	28,210,080	361,027,000	342,720,593	94.93	100%	392,497,200	79.61
2	12	02	2	04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Prosentase kinerja operator di 28 Kecamatan	54,805,700	19,188,650	2,737,700	2,165,600	79.10	100%	4,000,000	7.30
2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Prosentase Pelayanan Pencatatan Sipil	278,464,000	114,697,736	133,769,200	128,864,500	96.33	100%	183,054,548	65.74
2	12	03	2	01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase pencetakan akta kelahiran dan kematian	80,252,000	44,737,015	17,725,000	17,691,085	99.81	100%	63,023,655	78.53
2	12	03	2	02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Prosentase penyelenggaraan koordinasi antar instansi	198,212,000	69,788,521	116,044,200	111,173,415	95.80	100%	120,030,893	60.56
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase unit pelayanan administrasi kependudukan yang stabil Jarkomdatnya	2,572,683,240	158,256,180	2,563,575,760	2,349,859,257	91.66	100%	2,038,666,274	79.24
2	12	04	2	01	Pengumpulan Data dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Prosentase pengumpulan data dalam penyajian database kependudukan	71,021,000	2,955,000	82,950,000	74,300,800	89.57	100%	67,698,800	95.32
2	12	04	2	02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase penyusunan SOP penataan PIAK	343,563,650	19,458,212	387,535,810	342,649,340	88.42	100%	291,062,294	84.72
2	12	04	2	03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2,158,098,590	129,725,668	2,093,089,950	1,932,909,117	92.35	100%	1,679,905,180	77.84
2	12	04	2	04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase kinerja operator terkait teknologi informasi	-	6,117,300	-	-	-	-	-	-

2	12	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya buku profil kependudukan, buku agregat kependudukan dan jilid laporan kependudukan	-	20,933,400	-	-	-	-	-	
2	12	05	2	01	Penyusunan Profil Kependudukan	Prosentase penyusunan profil kependudukan	-	20,933,400	-	-	-	-	-	
JUMLAH							12,607,899,606	8,588,454,437	12,857,853,763	12,249,916,699	95.27	100%	8,676,772,770	68.82

Bojonegoro, 06 Agustus 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KAPUBATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, AP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003

Tabel 2.1 Sesudah Revisi

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2023
Kabupaten Bojonegoro

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstara SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase layanan yang dilaksanakan	9,834,961,286	7,371,534,728	9,786,144,103	9,415,706,749	96.21	100%	8,824,821,317	89.73
2 12 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunya layanan dan anggaran evaluasi perangkat daerah	122,028,600	180,845,225	84,753,600	78,664,700	92.82	100%	118,287,235	96.93
2 12 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,813,523,002	5,765,362,961	6,969,153,054	6,750,167,656	96.86	100%	6,937,075,740	88.78
2 12 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase tersusunya administrasi kepegawaian perangkat daerah	279,060,000	102,141,200	407,497,900	365,099,670	89.60	100%	268,829,350	96.33
2 12 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum perangkat daerah	983,764,620	859,550,500	1,910,973,380	1,851,217,478	96.87	100%	917,442,078	93.26
2 12 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	42,918,650	73,705,500	-	-	-	100%	27,000,000	62.91
2 12 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	324,596,414	225,253,692	299,197,319	259,661,245	86.79	100%	307,559,324	94.75
2 12 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	267,070,000	164,675,650	114,568,850	110,896,000.00	96.79	45 unit	248,627,590	93.09
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase pelayanan kependudukan	625,469,300	923,032,393	374,364,700	355,486,193	94.96	100%	575,126,000	91.95

2	12	02	2	01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan	89,618,400	875,633,663	10,600,000	10,600,000	100.00	100%	84,069,250	93.81
2	12	02	2	03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Prosentase pencetakan dokumen kependudukan	497,231,800	28,210,080	361,027,000	342,720,593	94.93	100%	458,041,650	92.12
2	12	02	2	04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Prosentase kinerja operator di 28 Kecamatan	38,619,100	19,188,650	2,737,700	2,165,600	79.10	100%	33,015,100	85.49
2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Prosentase Pelayanan Pencatatan Sipil	347,748,900	114,697,736	133,769,200	128,864,500	96.33	100%	319,337,730	91.83
2	12	03	2	01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase pencetakan akta kelahiran dan kematian	149,477,000	44,737,015	17,725,000	17,691,085	99.81	100%	128,278,585	85.82
2	12	03	2	02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Prosentase penyelenggaraan koordinasi antar instansi	198,271,900	69,788,521	116,044,200	111,173,415	95.80	100%	191,059,145	96.36
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase unit pelayanan administrasi kependudukan yang stabil jarkomdatnya	3,274,477,740	158,256,180	2,563,575,760	2,349,859,257	91.66	100%	3,231,768,517	98.70
2	12	04	2	01	Pengumpulan Data dan Pemanfaatan Database Kependudukan	Prosentase pengumpulan data dalam penyajian database kependudukan	71,021,000	2,955,000	82,950,000	74,300,800	89.57	100%	69,698,800	98.14
2	12	04	2	02	Penataan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase penyusunan SOP penataan PIAK	394,358,150	19,458,212	387,535,810	342,649,340	88.42	100%	393,378,746	99.75
2	12	04	2	03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2,809,098,590	129,725,668	2,093,089,950	1,932,909,117	92.35	100%	2,768,690,971	98.56
2	12	04	2	04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase kinerja operator terkait teknologi informasi		6,117,300	-		-			

2	12	05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya buku profil kependudukan, buku agregat kependudukan dan jilid laporan kependudukan		20,933,400	-	-				
2	12	05	2	01	Penyusunan Profil Kependudukan	Prosentase penyusunan profil kependudukan	20,933,400	-	-				
JUMLAH						14,082,657,226	8,588,454,437	12,857,853,763	12,249,916,699	95.27	100%	12,951,053,564	91.96

Bojonegoro, 06 Agustus 2024



YAYAN ROHMAN, AP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bojonegoro

NO	Indikator	SPM/standart nasional	IKK	Target Ranstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2022	2023	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Kepemilikan Wajib KTP-EI	99%	100%	100%	100%	100%	96,76%	99,58%	100%	100%	-
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
3	Cakupan Kepemilikan KIA	50%	40%	40%	40%	40%	37,56%	51,42%	40%	50%	-
	Cakupan Akte Kelahiran	98%	100%	100%	100%	100%	93,73%	95,83%	100%	100%	-
	Cakupan Akte Kematian	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	-
4	Penyelesaian Data Bermasalah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-
5	Kerjasama Pemanfaatan Data	12	12	12	12	14	7	10	10	12	-

Bojonegoro, 06 Agustus 2024


 KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BOJONEGORO
YAYAN ROHMAN, AP.,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740403 199403 1 003

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPDP tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rancangan RKPDP						Rancangan Akhir RKPDP					
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dispendukcapil	Persentase layanan yang dilaksanakan	100 %	14,650,476,665	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dispendukcapil	Persentase layanan yang dilaksanakan	100 %	13,200,306,473	-
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Persentase tersusunya layanan dan anggaran evaluasi perangkat daerah	100 %	246,298,100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Persentase tersusunya layanan dan anggaran evaluasi perangkat daerah	100 %	257,720,300	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	16,113,700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	18,113,700	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	8,262,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	10,262,800	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	7,996,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	7,996,500	-

6	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	7,440,200	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	7,440,200	-
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	2,299,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	4,298,400	-
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34 Laporan	107,846,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34 Laporan	107,366,800	-
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	96,339,100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	102,241,900	-
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Persentase Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10,561,054,471	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Persentase Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9,044,387,779	-
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispendukcapil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Org/Bln	10,282,894,471	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispendukcapil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Org/Bln	8,811,227,779	-
12	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispendukcapil	Jumlah penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144 Laporan	233,160,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispendukcapil	Jumlah penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144 Laporan	233,160,000	-

13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Persentase tersusunya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	389,434,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Persentase tersusunya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	389,434,000	-
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispendukcapil	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Org	297,237,500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispendukcapil	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Org	297,237,500	-
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispendukcapil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Org	92,196,500	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispendukcapil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Org	92,196,500	-
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2,024,798,962	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2,116,773,062	-
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispendukcapil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	18,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispendukcapil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	22,500,000	-
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispendukcapil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	1,485,344,162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispendukcapil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	1,556,983,262	-
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispendukcapil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	96,314,800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispendukcapil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	96,314,800	-
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispendukcapil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	114,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispendukcapil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	122,500,000	-
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispendukcapil	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	9.000 Buah	5,600,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispendukcapil	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	9.000 Buah	10,460,000	-
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	17,460,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	7,935,000	-

23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispendukcapil	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Kegiatan	287,080,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispendukcapil	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Kegiatan	300,080,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispendukcapil	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	564,594,200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispendukcapil	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	562,394,200	
	Pengadaan Mebel	Dispendukcapil	Jumlah Pengadaan Mebel	56 Unit	542,645,800	Pengadaan Mebel	Dispendukcapil	Jumlah Pengadaan Mebel	56 Unit	541,125,800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispendukcapil	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	21,948,400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispendukcapil	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	21,268,400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispendukcapil	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	426,133,632	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispendukcapil	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	331,133,632	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	105,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispendukcapil	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	159,905,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispendukcapil	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	159,905,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	161,228,632	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	166,228,632	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispendukcapil	Persentase pemeliharaan barang	100 %	483,163,300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispendukcapil	Persentase pemeliharaan barang	100 %	498,463,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispendukcapil	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	45 Unit	77,403,300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispendukcapil	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	45 Unit	117,828,100	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispendukcapil	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	36 Unit	130,470,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispendukcapil	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	36 Unit	152,002,600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispendukcapil	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	275,290,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispendukcapil	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	228,632,800
Program Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Persentase dokumen pendaftaran penduduk dan pindah datang yang diterbitkan sesuai SOP	100 %	956,505,890	Program Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Persentase dokumen pendaftaran penduduk dan pindah datang yang diterbitkan sesuai SOP	100 %	845,745,890
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Persentase dokumen pendaftaran penduduk dan pindah datang yang diterbitkan	100 %	91,803,900	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Persentase dokumen pendaftaran penduduk dan pindah datang yang diterbitkan	100 %	103,413,900
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	125.926 Dokumen	19,054,900	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	125.926 Dokumen	19,054,900
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	24 Laporan	47,225,000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	24 Laporan	58,835,000
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	24 Laporan	25,524,000	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	24 Laporan	25,524,000
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	761,779,300	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	640,179,300

Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	24 Laporan	617,784,700	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	24 Laporan	496,184,700	
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	130.648 Dokumen	143,994,600	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	130.648 Dokumen	143,994,600	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Persentase pencetakan dokumen kependudukan	100 %	102,922,690	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Persentase pencetakan dokumen kependudukan	100 %	102,152,690	
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	24 Laporan	102,922,690	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	24 Laporan	102,152,690	
Program Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang sesuai SOP	100 %	444,488,300	Program Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang sesuai SOP	100 %	354,796,000	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang dilayani (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)	100 %	117,140,700	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang dilayani (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)	100 %	117,140,700	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dispendukcapil	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	36.000 Dokumen	67,361,200	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dispendukcapil	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	36.000 Dokumen	67,361,200	

Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	16,699,800	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	16,699,800
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil yang disusun	243 Dokumen	33,079,700	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil yang disusun	243 Dokumen	33,079,700
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Persentase kebutuhan data pencatatan sipil yang disediakan	100%	300,041,700	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Persentase kebutuhan data pencatatan sipil yang disediakan	100%	210,349,400
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Dispendukcapil	Tecapainya rapat koordinasi dan Konsultasi dengan KUA se Kab. Bojonegoro	1 Rakor	45,830,900	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Dispendukcapil	Tecapainya rapat koordinasi dan Konsultasi dengan KUA se Kab. Bojonegoro	1 Rakor	45,830,900

Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Dispendukcapil	Jumlah koordinasi pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status dan kewarganegaraan	4 Koordinasi	7,499,800	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Dispendukcapil	Jumlah koordinasi pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status dan kewarganegaraan	4 Koordinasi	7,499,800	
Pelayanan Secara Aktif Pendataan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah kutipan akta perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak	240 Kutipan	7,999,900	Pelayanan Secara Aktif Pendataan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah kutipan akta perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak	240 Kutipan	7,999,900	
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah sosialisasi pencatatan sipil	3 Kali	163,903,600	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah sosialisasi pencatatan sipil	3 Kali	163,903,600	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12Laporan	18,597,800	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12Laporan	18,597,800	
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	56,209,700	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	56,209,700	

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil	100 %	27,305,900	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil	100 %	27,305,900
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah bimbingan teknis pencatatan sipil	6 Kali	27,305,900	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah bimbingan teknis pencatatan sipil	4 Kali	27,305,900
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Persentase unit pelayanan administrasi kependudukan yang stabil jarkomdatnya	89%	3,453,958,590	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Persentase unit pelayanan administrasi kependudukan yang stabil jarkomdatnya	89%	3,632,914,390
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dispendukcapil	Persentase pengumpulan data dalam penyajian database kependudukan	100%	60,663,000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dispendukcapil	Persentase pengumpulan data dalam penyajian database kependudukan	100%	60,907,400
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dispendukcapil	Data update kependudukan 12 bulan	36 Bulan	60,663,000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dispendukcapil	Data update kependudukan 12 bulan	36 Bulan	60,907,400
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Persentase penyusunan SOP penataan PIAK	100%	319,747,000	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Persentase penyusunan SOP penataan PIAK	100%	269,690,500
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun	1 Dokumen	319,747,000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun	1 Dokumen	269,690,500

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Persentase Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan yang terpenuhi sarana dan prasana sesuai dengan kebutuhan	95%	3,073,548,590	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Persentase Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan yang terpenuhi sarana dan prasana sesuai dengan kebutuhan	95%	3,302,316,490	
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan yang di fasilitasi sarana prasarana	95%	3,073,548,590	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan yang di fasilitasi sarana prasarana	95%	3,073,548,590	
JUMLAH				19,505,429,445	JUMLAH				18,033,762,753	-

Bojonegara, 06 Agustus 2024
 KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
 KABUPATEN BOJONEGARA

YAYAN ROHMAN, AP.,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740403 199403 1 003

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOJONEGORO

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

Bojonegoro, 06 Agustus 2024
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, AP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003

Tabel . 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Bojonegoro

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencanan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang dilaksanakan	Dispendukcapil	100 %	13,200,306,473	APBD	-	100%	21,159,535,267
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya layanan dan anggaran evaluasi perangkat daerah	Dispendukcapil	100 %	257,720,300	APBD	-	100%	295,990,000
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispendukcapil	18 Dokumen	18,113,700	APBD	-	18 Dokumen	16,197,400
2 12 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispendukcapil	3 Dokumen	10,262,800	APBD	-	9 Dokumen	8,276,000
2 12 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispendukcapil	2 Dokumen	7,996,500	APBD	-	6 Dokumen	8,104,100
2 12 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dispendukcapil	3 Dokumen	7,440,200	APBD	-	9 Dokumen	7,503,400
2 12 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dispendukcapil	3 Dokumen	4,298,400	APBD	-	3 Dokumen	2,294,700
2 12 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispendukcapil	34 Laporan	107,366,800	APBD	-	34 Laporan	120,647,400
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispendukcapil	2 Laporan	102,241,900	APBD	-	2 Laporan	132,967,000
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispendukcapil	100 %	9,044,387,779	APBD	-	100%	18,417,123,290

2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispendukcapil	59 Org/Bln	8,811,227,779	APBD	-	59 Org/Bln	18,175,803,290
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispendukcapil	144 Laporan	233,160,000	APBD	-	144 Laporan	241,320,000
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersusunya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dispendukcapil	100 %	389,434,000	APBD	-	100%	518,871,260
2	12	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dispendukcapil	75 Org	297,237,500	APBD	-	120 Org	422,161,360
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispendukcapil	65 Org	92,196,500	APBD	-	110 Org	96,709,900
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	Dispendukcapil	100 %	2,116,773,062	APBD	-	100%	1,039,833,685
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dispendukcapil	24 Paket	22,500,000	APBD	-	24 Paket	18,972,200
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispendukcapil	24 Paket	1,556,983,262	APBD	-	24 Paket	271,568,485
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dispendukcapil	24 Paket	96,314,800	APBD	-	24 Paket	153,475,000
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dispendukcapil	24 Paket	122,500,000	APBD	-	24 Paket	128,744,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Dispendukcapil	9.000 Buah	10,460,000	APBD	-	4.800 Buah	7,200,000
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispendukcapil	24 Laporan	7,935,000	APBD	-	24 Laporan	10,155,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispendukcapil	36 Kegiatan	300,080,000	APBD	-	56 Kegiatan	449,719,000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	Dispendukcapil	100 %	562,394,200	APBD	-	100%	70,264,300
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Dispendukcapil	56 Unit	541,125,800	APBD	-	Unit	44,754,900
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispendukcapil	1 Unit	21,268,400	APBD	-	Unit	25,509,400
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Dispendukcapil	100 %	331,133,632	APBD	-	100%	307,618,132
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispendukcapil	12 Bulan	5,000,000	APBD	-	12 Laporan	5,000,000
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispendukcapil	12 Bulan	159,905,000	APBD	-	12 Bulan	159,905,000

2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispendukcapil	24 Laporan	166,228,632	APBD	-	24 Laporan	142,713,132
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang	Dispendukcapil	100 %	498,463,500		-	100%	509,834,600
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	Dispendukcapil	45 Unit	117,828,100	APBD	-	45 Unit	78,918,600
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Dispendukcapil	36 Unit	152,002,600	APBD	-	36 Unit	138,696,000
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dispendukcapil	Paket	228,632,800	APBD	-	Paket	292,220,000
2	12	2			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk dan pindah datang yang diterbitkan sesuai SOP	Dispendukcapil	100 %	845,745,890	APBD	-	100%	763,286,600
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk dan pindah datang yang diterbitkan	Dispendukcapil	100 %	103,413,900	APBD	-	100%	83,175,000
2	12	2	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	125.926 Dokumen	19,054,900	APBD	-	125.926 Dokumen	8,744,500
2	12	2	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	24 Laporan	58,835,000	APBD	-	24 Laporan	47,422,000
2	12	2	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dispendukcapil	24 Laporan	25,524,000	APBD	-	24 Laporan	27,008,500
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Dispendukcapil	100%	640,179,300	APBD	-	100%	583,357,200
2	12	2	2.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Dispendukcapil	24 Laporan	496,184,700	APBD	-	24 Laporan	462,598,000
2	12	2	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Dispendukcapil	130.648 Dokumen	143,994,600	APBD	-	130.648 Dokumen	120,759,200
2	12	2	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pencetakan dokumen kependudukan	Dispendukcapil	100 %	102,152,690	APBD	-	100%	96,754,400

2	12	2	2.04	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	24 Laporan	102,152,690	APBD	-	24 Laporan	96,754,400
2	12	3			Program Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang sesuai SOP	Dispendukcapil	100 %	354,796,000	APBD	-	100%	444,480,600
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang dilayani (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)	Dispendukcapil	100 %	117,140,700	APBD	-	100%	71,824,900
2	12	3	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Dispendukcapil	36.000 Dokumen	67,361,200	APBD	-	36.000 Dokumen	30,789,900
2	12	3	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Dispendukcapil	Layanan	16,699,800	APBD	-	Layanan	15,785,800
2	12	3	2.01	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil yang disusun	Dispendukcapil	243 Dokumen	33,079,700	APBD	-	243 Dokumen	25,249,200
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kebutuhan data pencatatan sipil yang disediakan	Dispendukcapil	100%	210,349,400	APBD	-	100%	350,689,500
2	12	3	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Tecapainya rapat koordinasi dan Konsultasi dengan KUA se Kab. Bojonegoro	Dispendukcapil	1 Rakor	45,830,900	APBD	-	1 Rakor	17,001,600
2	12	3	2.02	02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status dan kewarganegaraan	Dispendukcapil	4 Koordinasi	7,499,800	APBD	-	4 Koordinasi	10,908,600

2	12	3	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendataan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah kutipan akta perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak	Dispendukcapil	240 Kutipan	7,999,900	APBD	-	240 Kutipan	14,272,100
2	12	3	2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah sosialisasi pencatatan sipil	Dispendukcapil	3 Kali	74,211,300	APBD	-	3 Kali	70,739,800
2	12	3	2.02	10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	0 Laporan	18,597,800	APBD	-	0 Laporan	12,071,600
2	12	3	2.02	11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	12 Laporan	56,209,700	APBD	-	12 Laporan	225,695,800
2	12	3	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil	Dispendukcapil	100 %	27,305,900	APBD	-	100%	21,966,200
2	12	3	2.03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah bimbingan teknis pencatatan sipil	Dispendukcapil	6 Kali	27,305,900	APBD	-	4 Kali	21,966,200
2	12	4			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase unit pelayanan administrasi kependudukan yang stabil jarkomdatnya	Dispendukcapil	0.89	3,632,914,390	APBD	-	89%	5,123,209,190
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan	Persentase pengumpulan data dalam penyajian database	Dispendukcapil	100%	60,907,400	APBD	-	100%	432,101,050
2	12	4	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Data update kependudukan 12 bulan	Dispendukcapil	36 Bulan	60,907,400	APBD	-	36 Bulan	432,101,050
2	12	4	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyusunan SOP penataan PIAK	Dispendukcapil	100%	269,690,500	APBD	-	100%	317,987,100
2	12	4	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun	Dispendukcapil	1 Dokumen	269,690,500	APBD	-	1 Dokumen	317,987,100
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan yang terpenuhi sarana dan prasana sesuai dengan kebutuhan	Dispendukcapil	95%	3,302,316,490			95%	4,373,121,040

2	12	4	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan yang di fasilitasi sarana prasarana	Dispendukcapil	95%	3,302,316,490		95%	4,373,121,040
Jumlah									18,033,762,753			27,490,511,657

Bojonegoro, 06 Agustus 2024
 KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, AP.,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740403 199403 1 003